



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana.....	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yatusman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yayusman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser**

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969

ABSTRAK

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963–1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963–1969.

Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron**

AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masih terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

PENGUATAN DEMOKRASI *CYBER* DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019

ABSTRAK

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019–2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber (*cyber space*) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.

Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang

kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas keamanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.

Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN *HUMAN SECURITY* DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

ABSTRAK

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin *human security* dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dinilai dapat mengancam *human security* masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi *human security*, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin *human security* masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

DDC: 320.5

Djuneidi

MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

ABSTRAK

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif, bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser****GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963–1969****ABSTRACT**

Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People's Triple Command (Trikorla) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?

Keywords: *the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans*

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron****THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT****ABSTRACT**

The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.

Keywords: *Papua conflict, repressive actions, dialogue*

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

STRENGTHENING INDONESIA'S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

ABSTRACT

In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.

Keywords: *democracy, cyber law, cyber democracy*

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

ABSTRACT

This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia's national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.

Keywords: *decentralization, national identity, regional autonomy*

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

ABSTRACT

This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation

allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.

Keywords: barter, transnational crime, border

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

ABSTRACT

All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia's border area in Papua. The development of Indonesia's border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.

Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade

DDC: 320.5

Djuneidi

MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

ABSTRACT

The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students' demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.

Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.

MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

Djuneidi

Kelompok Studi Antropologi (KeSAnt) Yogyakarta

E-mail: Djunssa@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students' demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.

Keywords: *Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism*

ABSTRAK

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif, bahkan cenderung "perang verbal", "perang politik identitas" yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Kata Kunci: *Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimisme*

PENDAHULUAN: DEMOKRASI PASCA REFORMASI 1998 & PEMILU 2019

Ada sebuah peristiwa penting ketika membicarakan fenomena pasca Pemilu 2019, yaitu kondisi objektif pasca reformasi di mana kebebasan sipil dalam berdemokrasi mengalami "kran terbuka" artinya semua orang mendapatkan kebebasan berpendapat, berorganisasi, berpolitik, berkarya dan mengekspresikannya, dan seterusnya.

Kondisi ini kemudian didukung oleh kemajuan teknologi informasi dengan dunia internet yang memunculkan media sosial dalam dunia maya. Pemerintahan pasca reformasi, selama 20 tahun, telah memberikan jaminan pada anak-anak bangsa tumbuh dan berkembang secara bebas. Keadaan seperti inilah yang menjadi latar belakang terjadinya fenomena bipolarisasi dan penguatan politik identitas masyarakat yang cukup ramai dalam setiap pergantian pimpinan pemerintahan baik di daerah maupun di pusat.

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan negatif dan bahkan cenderung “perang verbal”, “perang identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (*medsos*). Semua itu tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan media komunikasi, seperti sistem berbasis internet dan media sosial yang berkembang: *facebook*, *instagram*, *twitter*, *WhatsApp*, dan seterusnya. Semua orang bisa bicara apa saja tanpa hambatan ruang dan waktu, tanpa sopan santun dalam dunia nyata yang masih berlaku etika sosial-budaya dalam interaksinya.

Dalam konteks tulisan ini, fenomena identitas kebangsaan yang disebut ‘nasionalisme’ tidak semata-mata berangkat dari fenomena sosial-budaya yang terjadi pasca Pemilu Presiden 2019, tetapi juga tidak terlepas dari latar belakang sejarah sejak pasca reformasi 1998. Pasca reformasi tersebut, semua orang di Indonesia mengalami fase kemerdekaan berdemokrasi yang luar biasa. Semua orang boleh bicara apa saja, bebas berorganisasi, bebas berekspresi, berbagai karya buku dan media massa bebas diproduksi, seiring perkembangan kemajuan teknologi informasi, berkembang media sosial *online*, layanan *online*, dan seterusnya.

Salah satu dampaknya tentu ada yang negatif, seperti munculnya aliran-aliran politik identitas (basis keagamaan, kedaerahan) yang bebas mengembangkan jaringannya tanpa ada hambatan dari regulasi hukum positif, sekalipun bertentangan dengan ideologi negara yang sudah disepakati sejak berdirinya NKRI. Maraknya kelompok-kelompok atau organisasi sosial yang mempunyai kepentingan dengan identitas tertentu, yang biasa kita kenal sebagai “ormas” (organisasi massa), atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perkumpulan serta lembaga studi, dan seterusnya. Banyaknya organisasi dan kelembagaan yang dibangun oleh masyarakat sipil merupakan pertanda bahwa demokratisasi mulai tumbuh, seiring dengan keterbukaan regulasi pemerintah dalam membawa pembangunan bangsa dan negara ini.

Dalam kebebasan ini pula, kebebasan berpandangan mulai tumbuh sebebaskan-bebasnya. Bacaan “kiri” yang identik terkait dengan politik sosialisme-marxisme sudah tidak dilarang lagi, begitu juga dengan bacaan “kanan” yang identik dengan kaum fundamentalisme agama, atau yang cukup ekstrim adalah pandangan Islam tentang negara khilafah, ataupun negara berdasarkan injili. Pemahaman lain dan komunitas-komunitas pun muncul dengan ekspresinya masing-masing. Semakin kuat ekspresi antar komunitas itu ternyata mengandung potensi ancaman konflik sosial, karena adanya perbedaan nilai dan prinsip-prinsip yang saling menegasikan; atau pun pemaksaan atas pandangan & nilai-nilai yang dianut sendiri terhadap orang lain.

Gesekan dan potensi konflik sosial yang semakin terasa bisa dilihat dari adanya gerakan pemaksaan dan intimidasi tertentu pada kelompok yang lemah, dan dianggap bertentangan dengan dirinya. Intoleransi pun tumbuh subur, hingga sekarang. Bahkan, misalnya pada Pendidikan Anak-Anak Usia Dini (PAUD) pun sudah diajarkan untuk tidak bertoleransi dengan kawan-kawannya yang berbeda agama/kepercayaan. Padahal mereka masih anak-anak yang masih harus belajar banyak hal tentang keanekaragaman kehidupan. Cara mendidik seperti ini akan membuat bangsa Indonesia semakin terkucilkan dari pergaulan internasional.

Beragam budayawan dari seantero Nusantara mempertanyakan mana strategi kebudayaan Indonesia, mana identitas budaya Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ?

METODE PENELITIAN: ANTRO-JALAN-JALAN

Tulisan ini dibuat berdasarkan data-data kualitatif yang saya kumpulkan selama perjalanan kehidupan saya pasca tahun reformasi 1998 sampai 2019, ketika berada di Kota Tanjungkarang-Lampung, Kota Malang dan Surabaya, Kota Yogyakarta, Surakarta (Solo) dan Semarang, Pedesaan di Gunungkidul, lembah Merapi, Ponorogo, Pacitan, Banyumas, Situbondo, Banda Aceh, Aceh Besar, Pulau Sabang-We-Rubiah, Simeulue, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Padang Pariaman, Bangka-Belitung, Kota

Waikabubak dan Waingapu di Sumba, Kupang, Kota Jayapura dan Merauke, pedesaan Keerom dan desa perbatasan RI-Papua New Guinea di Papua, dan Sulawesi Tengah. Di wilayah-wilayah itu, saya bertemu juga dengan orang-orang dari wilayah lain yang belum saya singgahi, seperti bertemu orang Alor, orang Buton, orang Maluku, Orang Key, Orang Manado, Orang Toraja, Orang Kalimantan, dan masih banyak lagi. Orang-orang dengan beragam peran dan posisi sosial, profesi, dan keahliannya serta dari kelompok usia yang beragam; sangat menarik untuk belajar dari pengalaman mereka dalam menyikapi hidup dan menjalani kehidupannya.

Melalui perkenalan, pertemanan dan persaudaraan, saya mendapatkan banyak cerita dan kisah pengalaman empirik dari orang-orang yang saya temui tersebut. Saya mencatat hal-hal yang menarik bagi saya. Beberapa pertanyaan utama (tematik) yang selalu saya sampaikan kepada mereka antara lain adalah:

1. Apakah anda merasa sebagai warga negara Indonesia?
2. Yang kemudian dilakukan pendalaman dengan dua pertanyaan di bawah ini:
3. Apakah yang anda ketahui tentang PAN-CASILA?
4. Adakah yang anda banggakan sebagai warga negara Indonesia?

Kisah dan penjelasan yang sangat menarik dari mereka, membuat saya antusias untuk terus mengumpulkan data-data dari keanekaragaman orang-orang yang berlatar belakang budaya berbeda-beda tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ala jalan-jalan, ada yang menyebutnya sebagai “antro-jalan-jalan” dalam tradisi belajar Antropologi di Universitas Gadjadara (UGM) Yogyakarta. Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode kualitatif ala antropologi : wawancara umum, wawancara-mendalam dengan pendekatan “pertemanan-persaudaraan” yang mana orang bisa saling terbuka menyampaikan pendapat dan perasaannya, dan dilakukan pada anggota komunitas yang ditemui sepanjang perjalanan di suatu wilayah (Kepulauan Indonesia).

Data kualitatif yang terkumpul saya analisis berdasarkan data-fakta yang umumnya sudah terjadi, catatan media massa dan catatan riset sejarah sebagai referensi pembandingan. Akhirnya proses analisis ini juga merupakan bagian dari asumsi pemikiran subjektif atau interpretasi saya untuk memahami fenomena identitas kebangsaan dan nasionalisme yang ada pada komunitas-komunitas tersebut di wilayah Nusantara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Merasa Indonesia

“Apa komentar bapak terhadap ‘rame-rame’ antara kubu 01 dan kubu 02 dalam Pemilu Presiden sekarang?” Saya bertanya kepada seorang bapak setengah baya, usia sekitar 52 tahun, asli orang suku Amungme di Timika, Papua, dimana perusahaan tambang terbesar di Indonesia beroperasi menghasilkan tembaga, emas, dll.

“Kami di sini sudah jelas menetapkan pilihan pada Presiden Joko Widodo¹, ‘rame-rame’ atau ribut-ribut antar kubu itu ma, saya tidak peduli, ribut-ribut itu juga hanya di Jakarta, di sebagian Jawa saja. Papua sini ma jauh dari Jakarta. Santai aja...” jawab bapak itu dengan santai sambil menikmati segelas bir bintang produk Indonesia.

“Presiden Jokowi jelas diterima di Papua, karena pembangunannya jelas terasa bagi orang di Papua. Bangun jalan antar kota, air minum, pasar, puskesmas, sekolah, listrik, dan banyak lagi. Rakyat Papua merasakan sekali manfaatnya, perubahannya...karena itu Gubernur terpilih Lukas Enembe, meskipun dari partai demokratis-SBY yang berkoalisi dengan Gerindra dari kubu 02, memutuskan dan menyatakan kepada publik untuk memilih Jokowi sebagai presiden berikutnya.” Jelas bapak itu lebih jauh.

Apakah anda merasa sebagai warga negara Indonesia? Pertanyaan yang saya ajukan kepadanya.

¹ Calon presiden pada kubu 01, petahana yang sering disebut “Presiden Jokowi”. Wawancara dengan bpk AW di Jayapura, Papua, 23 Nov 2018. Bpk AW berlatar pendidikan tinggi, pengalaman bekerja pada organisasi dunia dan lembaga-lembaga tingkat nasional, pelatihan tingkat nasional dari Universitas Cenderawasih, UGM, BNPB, SAR, dan juga dari organisasi kemanusiaan internasional, seperti Unicef.

“Secara jujur, sebenarnya saya tidak merasa sebagai bangsa Indonesia sepenuhnya, ada sebagian rasa yang tidak terima gitu, ...artinya karena selama ini banyak kekerasan yang terjadi di tanah Papua. Pemerintah seperti mendiskriminasikan kami yang tertinggal dan semakin tertinggal saja. Tapi harta kekayaan kami dieksplorasi dan dieksploitasi besar-besaran demi keuntungan pejabat-pejabat korup di Jakarta di Jawa.”

Ketika pertanyaan itu saya ajukan kepada beberapa orang di wilayah yang berbeda-beda, memang ada banyak ragam jawaban yang menarik:

Saya tidak akan bisa menyatakan berapa persen kelompok yang ‘merasa sebagai warga negara Indonesia’ dan yang ‘Tidak Merasa/Merasa sebagian sebagai Warga Negara Indonesia’ karena saya tidak melakukan perhitungan kuantitatif dari semua subjek (informan) yang saya temui. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pendalaman informasi mengenai latar belakang dan alasan-alasan serta penjelasan tentang apa yang menjadi sikap mereka menyatakan demikian.

Tidak semua bisa ditampilkan di sini, tetapi rangkuman dari fenomena tersebut bisa menjadi bahan temuan yang menantang untuk dikaji lebih

Merasa sebagai Warga Negara Indonesia	Tidak Merasa/Merasa sebagian sebagai Warga Negara Indonesia
<p>“Ya, saya warga negara Indonesia, karena saya lahir dan besar di Negara Republik Indonesia,” (AR, 41 thn, pegawai bank, Yogyakarta, 2019)</p>	<p>“100 persen saya bukan Indonesia, saya ini orang mikronesia, kulit hitam dan keriting rambut....” (WL, 21 thn, mahasiswi, Jayapura, Nov.2018).</p>
<p>“...Saya merasa bersyukur bisa menjadi warga negara Indonesia, negeri yang kaya dan aman... bisa dibayangkan bila terlahir di Timur Tengah seperti di Lebanon, Suriah, Palestina,... atau di benua Afrika, di Ethiopia, Sudan,...” (Mar.46 thn, pedagang buku, Jakarta, Jan 2011).</p>	<p>“Yaa...Saya merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tetapi tidak mempercayai Pancasila sebagai ideologi saya, karena saya hanya percaya pada Al’Quran sebagai satu-satunya ideologi dalam hidup saya.” (MA, 26 thn, mahasiswa, Solo, Okt 2018)</p>
<p>“...Saya bersyukur sekali bisa menjadi warga negara Indonesia. Negeri yang aman dan makmur, sepanjang tahun bisa menikmati hangatnya sinar Matahari dan udara yang segar....”(AM, 49 thn. Dosen, Semarang, Feb.2016).</p>	<p>“...secara KTP, lahir dan besar di sini di Indonesia, saya adalah warga negara Indonesia, tapi tidak merasa menjadi warga negara sepenuhnya karena selalu mendapatkan sikap dan perilaku diskriminatif oleh aparat negara, terutama pemerintahan.” (TS, 45 thn, pegawai swasta, Bandar Lampung, April 1999, Keturunan Tionghoa).</p>
<p>“...sudah terlahirkan di sini, ya terima saja apa adanya, menjadi warga negara Indonesia yang sudah merdeka dari penjajahan zaman Kolonial Belanda, Jepang dan perang kemerdekaan. Ini sudah luar biasa...” (Muh.Z.42 thn. Mahasiswa S-2, Kalimantan Timur, 2011).</p>	<p>“...menjadi warga negara Indonesia ini seperti ket-erpaksaan, karena kami sebenarnya ingin merdeka sebagai warga negara Aceh Darussalam.” (M.An.35 thn, Banda Aceh, Nov.2006).</p>
<p>“...ya jelas toh mas, mau jadi warga negara mana ? Lha wong lahir dan hidup sudah jelas di Indonesia.” (Sugmn,39 thn, petani muda keturunan Jawa, Keerom, Jayapura, Maret 2018)</p>	<p>“...Menjadi warga negara Indonesia yang bers-ariah, boleh....tapi mengikuti Pancasila sebagai ideologi itu yang saya tidak bisa menerimanya.” (Tri.30 thn, Guru SD, Kudus, 2016).</p>

jauh dan lebih spesifik. Rangkuman itu sebagai berikut ini.

1. Latar belakang pendidikan, seperti mahasiswa atau pun dosen yang saya jumpai tidak menentukan perbedaan atau pasti ‘merasa sebagai warga negara Indonesia’. Cukup banyak juga yang berani menyatakan diri bahwa mereka tidak sepenuhnya merasa sebagai warga negara Indonesia yang berideologi Pancasila² (conveyindonesia.com), atau yang berafiliasi dengan gerakan politik identitas seperti di Papua yang mana mereka tidak merasa sebagai bangsa (warga negara) Indonesia, tetapi sebagai bangsa Mikronesia yang mengidentikan diri dengan ciri biologis ‘hitam kulit keriting rambut’.
2. Faktor yang signifikan membedakan kedua kelompok itu adalah pengalaman berinteraksi dengan orang-orang yang beragam budaya, dengan beragam suku bangsa yang memberikan banyak pengalaman terhadap perbedaan pandangan dan nilai-nilai dalam kehidupan yang sangat beranekaragam ini. Kelompok yang ‘merasa sebagai warga negara Indonesia’ yang pada umumnya menyatakan bersyukur atas keberadaannya di Indonesia rata-rata memiliki pengalaman tumbuh kembang di antara orang-orang yang beragam budaya, memiliki interaksi sosial yang luas kepada jaringan sosialnya dari latar belakang budaya dan religiusitas yang berbeda-beda. Kekayaan interaksi sosial yang beraneka ragam ini memberikan fondasi pemahaman atas kekuasaan ilahi yang maha kuasa pada penciptaan manusia yang beranekaragam. Bahwa perbedaan antar manusia di muka bumi ini adalah ciptaan-Nya, oleh karena itu wujud nilai-nilai kehidupan kemanusiaan menjadi dasar yang baik bagi perkembangan manusia dengan manusia

lainnya. Maka mereka lebih memahami sesama manusia daripada hanya memahami umatnya /kelompoknya saja.

3. Berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan ragam budaya tersebut membawa konsekuensi bahwa umur seseorang yang lebih tua cenderung mempunyai pengalaman yang bermakna dalam berinteraksi dengan ragam budaya manusia lainnya. Maka, orang-orang yang sudah cukup berusia tua, di atas 50-an tahun umumnya cukup banyak memahami sejarah bangsa Indonesia, dan mempunyai sikap yang tegas tentang ‘merasa sebagai Warga Negara Indonesia’, dan memahami betul ideologi Pancasila yang memegang teguh prinsip ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sebagai haluan bernegara bangsa yang begitu kaya suku bangsa dan kebudayaannya.
4. Dan sebaliknya, mereka yang ‘Tidak Merasa/ Merasa sebagian sebagai Warga Negara Indonesia’ umumnya tidak banyak berinteraksi dengan banyak suku bangsa yang beragam budaya. Interaksi antar suku bangsa yang bermakna terjalin melalui pertemanan, persaudaraan, kekerabatan, perkawinan antar beda-budaya, perkumpulan dan organisasi masyarakat sipil (yang inklusif) akan memberikan cara pandang dan penilaian yang lebih humanis bagi setiap manusia, karena sisi kemanusiaan itu dipahami dalam konteks keanekaragaman, bukan dalam konteks kesamaan (eksklusif).

Analisis Ideologi Berdasarkan Kelompok Usia

Tabel berikut ini adalah hasil pengelompokan data kualitatif yang terkumpul selama rentang tahun 1998-2019 terhadap informan berdasarkan usia dan rentang waktu tertentu.

² Lembaga pendidikan tinggi dan setingkat SMA menjadi tempat penyebaran paham ekstrimisme agama atau gerakan radikalisme yang ingin menggantikan ideology negara Pancasila menjadi Khilafah. Temuan Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2017, bahwa 39% mahasiswa terpapar paham radikal, dan 24% mahasiswa dan 23,3% pelajar setingkat SMA setuju dengan negara islam. Penelitian Maarif Institute (2017) menemukan bahwa infiltrasi paham radikal di lembaga pendidikan masuk melalui alumni, guru, dan kebijakan sekolah

Usia (Generasi)	Analisis data kualitatif periode tahun 1998-2009	Analisis data kualitatif periode tahun 1910-2019
20 tahunan (15-20 thn)	<p>Generasi muda yang menggelora dengan semangat reformasi, semangat menyambut perubahan lebih baik. Semangat untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan bangsa yang lebih demokratis, adil dan makmur.</p> <p>Semangat membangun Indonesia maju dalam proses transisi pasca reformasi ternyata mengalami stagnasi dalam proses pembangunan yang tidak mengalami perubahan signifikan. Bedakan saat 5 tahun pertama sejak 1998, perubahan fundamental terjadi di tingkat regulasi (konstitusi) seperti dipisahkannya Kepolisian dari ABRI (menjadi TNI), pembatasan jabatan kekuasaan presiden.</p>	<p>Generasi ‘milenial’ yang banyak menikmati kebebasan berekspresi dan berinteraksi dengan dunia internasional, modernisasi, industrialisasi yang didukung kemajuan teknologi komunikasi, dan cenderung ‘lepas’ dari sejarah tradisionalnya, jauh dari nilai sejarah bangsanya, lebih cenderung menjadi kaum kosmopolitan. Melihat Pancasila hanya sebatas simbolis kenegaraan, bahkan banyak yang tidak tahu rumusan Pancasila dan sejarahnya. Kebanggaan sebagai warga negara Indonesia cenderung terbatas dan sementara seperti ketika ada kompetisi olahraga antar negara, namun lebih banyak cenderung meng-gilai produk karya budaya negara bangsa lainnya, lihat budaya K-POP dan Jepang yang sudah sampai ke pasar-pasar tradisional di Indonesia.</p>
25 tahunan (20-25 thn)	<p>Generasi muda yang sudah matang dengan peran aktif di berbagai organisasi. Aktif dalam mengkaji dan mengkritisi kebijakan pemerintahan. Muncul tokoh-tokoh pergerakan demokrasi dari kalangan muda dengan kelompok-kelompok diskusi dan dinamika organisasinya.</p> <p>Rata-rata hafal dengan rumusan Pancasila karena memang diajarkan di sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi (penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).</p> <p>Umumnya bangga sebagai warga negara Indonesia karena berada di kepulauan Nusantara yang kaya alam dan kebudayaan yang beraneka-suku bangsa. Semangat Nusantara nampak dalam upaya pergerakan demokratisasi NKRI dan pembebasan dari belenggu pemerintahan yang korup dan otoritarian.</p>	<p>Generasi ‘milenial’ yang lahir ketika pergolakan tahun reformasi atau runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pimpinan Soeharto, generasi yang tidak mendapatkan pengajaran tentang Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila lebih ditinggalkan seakan menjadi trauma dari perlakuan Orde Baru sebagai pelanggeng kekuasaan. Tidak ada pelajaran lagi tentang Pancasila secara khusus di sekolah-sekolah.</p> <p>Akibatnya, generasi ini hampir (untuk mengatakan ‘tidak’) kehilangan orientasi kebangsaan, identitasnya sebagai warga negara dengan kesadaran memiliki Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan mulai muncul berbagai pandangan/ideologi tertentu yang diadopsi dari luar negeri atau negara lain yang diikuti oleh generasi muda ini, contohnya pandangan tentang khilafah, yaitu negara Islam menurut penafsiran atau aliran tertentu tentang tata-negara yang sah dan halal menurut penafsiran ajaran Islam tertentu.</p>
30 tahunan (25-30 thn)	<p>Generasi yang berpengalaman dalam pergolakan reformasi, semangat perubahan untuk perbaikan keadaan tata kelola kenegaraan sampai perubahan keadaan masyarakat untuk berkembang lebih baik. Berbagai gerakan aktivis generasi ini memunculkan banyak sekali kelompok-kelompok swadaya masyarakat (LSM) yang membawa dampak pada penguatan masyarakat menjadi lebih mandiri dan meningkatkan daya kritis masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kelompok itu.</p> <p>Ideologi politik mereka jelas adalah Pancasila dengan cara pandang baru oleh generasi baru pasca reformasi.</p>	<p>Kelompok generasi yang cenderung gagap dalam memahami Pancasila, ‘pernah mendengar tentang Pancasila, namun hampir semua tidak mampu menyebutkan rumusannya, dan sangat jarang yang mendiskusikannya untuk pemahaman. Artinya banyak dalam generasi ini yang menganggap Pancasila memang sudah tidak penting dan ketinggalan zaman. Tidak jarang juga yang sudah terpapar ideologi lain sebagai pengganti ideologi Pancasila yang menjadi haluan negara bangsa RI. Bahkan yang ikut misi ‘jihad’ yaitu perang sampai mati atas nama Agama Islam cukup banyak dari kelompok generasi ini.</p>

	Bangga sebagai warga negara Indonesia, dengan merah putih, dan pergerakan demokratisasi.	
35 tahunan (30-35 thn)	<p>Generasi muda yang banyak melakukan perjuangan demokratisasi di Indonesia meskipun menghadapi pemerintahan RI yang otoriter terhadap masyarakatnya. Paham sekali tentang Pancasila.</p> <p>Generasi ini bangga menjadi warga negara Indonesia yang kritis dan berani terlibat dalam perubahan kekuasaan pada 1998.</p>	<p>Generasi muda zaman reformasi ini cukup paham atas peristiwa peralihan zaman pada 1998, cukup tahu dan paham atas Pancasila sebagai ideologi negara bangsa RI. Terbatas dengan pemahaman terhadap sejarah kemerdekaan dan sejarah nusantara.</p> <p>Bangga menjadi warga negara Indonesia karena berada di ruang dan waktu yang kaya atas sumber daya alam dan kebudayaan suku bangsa.</p>
40 tahunan (35-40 thn)	<p>Generasi dewasa yang memahami Pancasila dan dinamika perkembangan kenegaraan yang mulai bergeser menuju negara demokrasi.</p> <p>Mereka cenderung mendukung perjuangan generasi yang lebih muda dalam pergerakan pasca reformasi.</p> <p>Mereka membanggakan merah putih sebagai identitas warga negara RI yang sedang direbutnya dari kekuasaan otoritarian rezim Orde Baru Soeharto.</p>	<p>Generasi dengan sikap yang masih jelas terhadap Pancasila sebagai ideologi negara bangsa RI. Namun ada juga yang berbeda haluan atau ideologi kenegaraan namun kurang terlibat aktif atau masuk dalam basis kelompok fundamentalis agama tertentu.</p> <p>Kelompok generasi ini bangga dengan perjuangan gerakan reformasi yang mengikuti seniorinya (usia 45 tahunan), paham tentang sejarah perjuangan kemerdekaan ataupun sejarah nusantara.</p>
45 tahunan (40-45 thn)	<p>Generasi tua (bagi saya) yang lebih cenderung memilih aman dari dampak gerakan reformasi pada 1998. Meski pun demikian, para pejuang kemanusiaan dan demokratisasi muncul dari generasi ini menjadi tokoh yang didengar dan diteladani. Mereka inilah yang memberikan dorongan terhadap generasi muda untuk terus melakukan tekanan atas gerakan perubahan reformasi.</p> <p>Mereka jelas paham dan hafal tentang Pancasila dari sekolah zaman rezim Soeharto. Pancasila yang disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan rezim itu. Kebanggaan mereka ini adalah adanya generasi baru yang mampu menghadapi situasi sulit dan berani menghadapi perubahan reformasi ataupun revolusi untuk meraih keadaan yang lebih baik, lebih demokratis.</p>	<p>Generasi pada usia matang dengan pengalaman yang berharga pada masa peralihan ke masa reformasi.</p> <p>Para tokoh pergerakan reformasi telah menjadi pejabat pemerintahan dan anggota parlemen (DPR-RI dan DPRD). Banyak yang terlibat dalam berbagai kegiatan program lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan (NGOs) ataupun kelompok swasta.</p> <p>Kelompok generasi ini sangat bangga dengan NKRI yang kaya akan alam, keanekaragaman budaya dari suku-suku bangsa yang ada di Nusantara.</p>

Masyarakat Indonesia Terbelah

Pasca Pemilu 2019 masyarakat Indonesia nampak sekali terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu pendukung Joko Widodo dan kubu pendukung Prabowo Subianto. Sebelumnya, masyarakat sudah terbelah dengan fenomena Ahok yang disidangkan sebagai “penista agama Islam”.

Masyarakat terbelah dalam dua kubu : Ahok & Joko Widodo berhadap-hadapan dengan kubu Anies Baswedan & Prabowo Subianto.

Dalam bentuk sederhana, bipolarisasi sosial itu sangat terasa sampai di tingkat akar rumput. Secara umum saya tampilkan dalam tabel berikut ini.

No.	Citra Kubu 01 (Joko Widodo) oleh Kubu 02	Citra Kubu 02 (Prabowo Subianto) oleh Kubu 01
1	Disebut “Cebong”	Disebut “Kampret”
2	Didukung kelompok PKI	Didukung kelompok Islam pro Khilafah
3	Islam Nusantara	Islam “garis keras”
4	Dekat dengan “Aseng” atau negeri China	Dekat dengan negeri Arab (Wahabiisme)
5	Tidak tepati janji	Penyebarkan hoaks
6	Memanipulasi informasi kepada publik	Memaksakan kehendak
7	Menyalahgunakan kekuasaan (petahana)	Menghalalkan segala cara
8	Membangun NKRI pro asing-“aseng”	Membangun NKRI bersyariah
9	Jika menang, Indonesia akan bubar	Jika menang, Indonesia tinggal DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera
10	Pemerintahan “boneka”	Pemerintahan “penjagal anak bangsa”

Nasionalisme dan Identitas Indonesia

Saya mencoba mencari tahu tentang hubungan antara “pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia” dengan “rasa kepemilikan sebagai bangsa Indonesia”. Dan saya mendapati bahwa semua yang menyatakan diri hanya merasa sebagian menjadi bangsa Indonesia atau merasa tidak menjadi bangsa Indonesia, mereka semua tidak mengetahui dan memahami para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia atau sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemahaman tentang sejarah bangsa Indonesia sangat terkait erat dengan sentimen kepemilikan terhadap negara-bangsa Indonesia. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya, dalam memperjuangkannya dari penjajahan bangsa lain, maka semakin tinggi pula nasionalisme dan semakin jelas identitas Indonesia yang mereka pahami.

“Indonesia ini dibangun, didirikan dengan penuh perjuangan dari segenap rakyat di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa. Pengorbanan para pejuang dari zaman kolonialisme Belanda sampai perang dunia, perang kemerdekaan ... itu sangat luar biasa heroik, lihat Muhammad Hatta, Ir. Soekarno, M. Syahrir, Tan Malaka, Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, Malahayati, Cilik

Riwut, Pattimurah,....” Kata TNur, 46 thn, seniman musik, Kota Malang, Jawa Timur.

Saya selalu bertanya dan bertanya berulang kali apa yang mereka ketahui tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia sebagai negara, perjuangan melawan penjajahan kolonial, dan siapa tokoh perjuangan Indonesia atau pahlawan yang dikenal—setidaknya mengetahui sedikit sejarahnya--ketika saya mencoba meyakinkan diri untuk mengetahui hal itu pada kelompok yang ‘Tidak Merasa/Merasa sebagian sebagai Warga Negara Indonesia’, saya banyak menemui jawaban yang mengejutkan:

“Saya tidak tahu siapa Pangeran Diponegoro itu, saya lebih banyak diberikan pelajaran tentang sejarah Mesir dan peradaban Islam sampai di sini,” kata WW (23thn), mahasiswa, Cirebon.

“...Tokoh yang saya kenal itu Walisongo, Mas, sejarahnya saya sering dengar dari kumpulan pengajian di kampung saya,” MSy (26 thn), tukang kayu, Sragen.

“Kami tidak diajarkan di sekolah tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ... di kampus sudah beda lagi mata kuliahnya,” Ch.M (22 thn), mahasiswa Wonosobo.

“...Ya yang saya tahu,....Indonesia itu Merdeka, diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia,” NiS.(25 thn), pedagang warung makan, Kupang.

Kisah menarik dari anak seorang diplomat di salah satu negara Eropa, Mdrn (27 thn) ketika berada di Sikakap, Mentawai 2011, bahwa “banyak anak-anak Indonesia yang kuliah di luar negeri, di negara-negara Eropa ini yang dikerjain ayahku, setiap ada urusan administrasi di kantor, mereka selalu ditanya-tanya tentang Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Ya disuruh nyanyi segala... Dan hampir semua mahasiswa itu rata-rata tidak hafal Pancasila dan tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya.”

Fenomena ini rupanya berlanjut sampai tahun 2019-an ini (Harian *online*, Kompas.com, 25 Mei 2019), menyajikan “Kisah Dokter Yusuf Nugraha, Gratiskan Pasien yang Hafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya.” Dokter yang buka praktik di Klinik Harapan Sehat di Cianjur, Jawa Barat, ini sangat kreatif dengan mengadakan program paket pelayanan kesehatan gratis bagi kaum miskin. Setelah paket pelayanan kesehatan gratis dengan menyerahkan 10 botol plastik bekas dan hafalan 1 juz Al’Quran bagi yang muslim, kini dokter lulusan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi itu mengeluarkan program paket berobat gratis hanya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hafalan Pancasila.

“Ini adalah wujud komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat, khususnya yang tidak mampu,” kata Yusuf, saat ditemui Kompas.com, di kliniknya, di Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (24/05/2019) petang. “Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang maknanya sangat mendalam itu bisa lebih meningkatkan dan menguatkan rasa nasionalisme kita,” harapnya (Kompas.com, 25 Mei 2019).

Menjadi nasionalis Indonesia, bagi bangsa ini, adalah tuntutan dan tantangan untuk mewujudkan Indonesia Raya, karena tanpa tekad satu bangsa untuk hidup bersama mencapai damai sejahtera bersama-sama, maka negara-bangsa itu akan melemah dan akhirnya porak-poranda. Hal ini sudah diingatkan oleh salah satu *founding fathers* kita: Ir. Soekarno.

“Jadi gerombolan manusia, meskipun agamanya berwarna macam-macam, meskipun bahasanya bermacam-macam, meskipun asal

turunannya bermacam-macam, asal gerombolan manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama, itu adalah bangsa,” kata Soekarno (Kompas.com, 29 November 2018).

Bangsa yang mempunyai kesadaran hidup bersama itu yang disebut juga nasionalisme, dan tentunya mempunyai haluan/ideologi bersama dalam organisasi besar yang disebut negara. NKRI adalah bentuk organisasi kenegaraan yang sudah disepakati bersama dengan Pancasila sebagai ideologinya, karena itu membangun bangsa ini harus membicarakan perbedaan, keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman habitat, keanekaragaman kepercayaan/agama, keanekaragaman kekayaan alam Nusantara. Karena keanekaragaman itulah kekayaan sesungguhnya Indonesia. Maka untuk menjadi Indonesia Raya, yang harus dibangun adalah saling percaya dan toleransi positif yang terbuka sehingga setiap insan Indonesia merasakan kemerdekaan sesungguhnya; merdeka menjalankan keyakinan/kepercayaannya/agamanya tanpa sedikit pun ada rasa takut, tanpa ada rasa minder, dan tanpa sikap intoleransi.

Menjelang Pemilu 2019, justru yang kita hadapi adalah fenomena sosial yang jauh dari harapan tersebut. Ada kasus palang salib di kuburan dipaksa dipotong supaya tidak membentuk salib, karena tuntutan sekelompok orang tertentu (yang pastinya intoleran), di Yogyakarta pula yang katanya terkenal sebagai kota toleran. Ada gereja yang dibom dengan cara bom bunuh diri yang dilakukan sekeluarga (bapak-ibu-anak-anak) di Surabaya, dan kasus-kasus ekstrimisme & terorisme lainnya.

Pasca Pemilu DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, masyarakat Indonesia seakan terbagi dua (bipolar) yang saling berhadap-hadapan, yaitu yang berpihak pada ketokohan Ahok & Joko Widodo, dan yang berpihak pada Anies Baswedan & Prabowo. Keduanya saling membangun citra diri dan menggaungkan serangan yang menjatuhkan satu sama lain. Melalui medsos, terjadilah perang informasi dan hoaks. Kita masih sibuk seperti ini, sibuk rebutan kekuasaan dan sumberdaya sendiri. Sementara negara-negara yang lebih maju sudah memikirkan dan mempersiapkan strategi perdagangan antar negara, antar benua,

strategi kebudayaan, dan kelangsungan hidup yang jauh ke depan.

Homo Ludens

Manusia Indonesia, dalam wacana sebagai homo ludens (Huizinga, J.,1990), telah menjadi manusia yang begitu serius dan kaku. Kondisi ini apabila dikaitkan dengan konteks Pemilu 2019 nampak sekali bahwa manusia-manusia Indonesia terjebak dalam ketegangan kampanye kompetisi untuk pemenangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) masing-masing. Karena hanya ada dua kandidat pasangan capres dan wapres pada tahun 2019 ini, yaitu pasangan 01: Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan pasangan 02: Prabowo Subianto-Sandiaga Uno; maka terjadilah bipolarisasi yang semakin kental antara pendukung kedua kubu tersebut. Ejek-mengejek, sindir-menyindir sampai caci-maki yang negatif terjadi antara kedua belah pihak yang terfasilitasi oleh media sosial (medsos) berbasis internet. Dalam kompetisi yang semakin sengit, mereka yang tertarik dalam sentimen dan pusaran dinamika kampanye telah menjadi "prajurit-prajurit" yang saling berperang, saling menjatuhkan, kalau perlu saling "membunuh" (mematikan karakter seseorang melalui hoax dan manipulasi lainnya). Bahkan ungkapan pembunuhan dengan mudah diucapkan atau dituliskan dalam medsos dan diviralkan. Semua terasa tegang, serius yang kaku, seperti robot yang siap beradu perang di arena pertarungan.

Orang-orang banyak yang kehilangan canda dan tawanya. Olahraga saja dikaitkan dengan wacana politik lokal yang sedang hangat. Sentimen eksklusivitas semakin menguat, apalagi nampak sekali kebangkitan politik identitas dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang terkait dan berlatar belakang Islam. Sentimen keislaman pun semakin menunjukkan identitasnya secara terbuka dengan berkibarnya bendera organisasi sebagai simbol kekuasaan, dan sampai turun ke jalan-jalan. Dalam hal ini, pertanyaan yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengapa negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam ini, justru dari kalangan kelompok Islam yang selalu gelisah dan khawatir terhadap umat lainnya? Fenomena masjid dibakar massa sangat

jarang, atau boleh dikatakan hampir tidak ada dalam kondisi normal di Indonesia, tetapi gereja dan tempat ibadah umat lain seperti Budha/Hindu/Konghucu mempunyai catatan panjang yang sampai sekarang terus terjadi. Negara dan aparatnya masih kurang berdaya; dan hukum cenderung mengikuti kekuasaan mayoritas.

Ketegangan antar kedua kubu pilihan politik itu mencapai puncaknya pada hari 21-22 Mei 2019 dimana terjadi protes dari kubu pasangan 02 yang menolak hasil pemilihan umum pada 17 April 2019 yang menyatakan kemenangan pada kubu 01 dengan suara 55,50%, karena proses pemilu ini dianggap penuh kecurangan, mereka menyebutnya sebagai kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif. Demonstrasi atas kecurangan pemilu ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Menjelang pengumuman hasil pemilu, suasana sudah semakin memanas, ada ancaman "*people power*", gerakan kedaulatan rakyat, sampai polisi menangkap beberapa kelompok yang akan melakukan pengeboman (teroris) dan penangkapan sekelompok orang yang akan menggunakan senjata api untuk melakukan penembakan kepada aparat dan massa demonstran pada 22 Mei 2019. Dan sehari sebelumnya, KPU sudah berhasil menyelesaikan penghitungan suara yang masuk ke kantor pusat. Dan meledaklah amarah dan kekecewaan dari kubu 02. Hal yang wajar terjadi bagi pihak yang kalah dalam suatu kompetisi. Kekecewaan dan amarah yang tidak bisa terbendung memperlihatkan bahwa kedewasaan manusia Indonesia (sebagai negarawan, bukan sekedar politisi) masih perlu ditingkatkan dan dilatih lagi. Tidak bisa menerima kekalahan dalam suatu kompetisi, barangkali harus banyak belajar dalam arena pertandingan olahraga. Dalam dunia olahraga, sportivitas dan persaudaraan antar ras-bangsa-bangsa manusia terjalin dengan indah.

Demikianlah manusia Indonesia, modernisasi telah membuat manusia-manusianya lupa bahwa kehidupan ini adalah suatu "permainan dan senda-gurau", bahwa suatu permainan dalam setiap fase kehidupan mempunyai batasan waktu, aturan main, pemenang dan pengalah, kemudian fase itu berakhir untuk memulai kehidupan pada

fase yang baru. Namun demikian, kerinduan semua manusia adalah kehidupan yang damai, sejahtera dan bahagia; karenanya setiap permainan dalam kehidupan semestinya bisa memberikan hal tersebut, tanpa dikuasai amarah & angkara murka karena kekecewaan atau kerugian yang diakibatkannya. Angkara murka karena kekalahan dalam suatu permainan (kompetisi) itu petanda bahwa manusia-manusianya masih dalam taraf ego-kanak-kanak, yang masih fokus pada pengakuan dan pemenuhan diri sendiri.

Sebagai homo ludens, manusia itu senang bermain, sekalipun dalam dunia yang serius; prinsip permainan selalu hadir dalam aktivitas kehidupan, misalnya 'aturan' dalam permainan mewujudkan menjadi 'undang-undang/peraturan (*law*)' dalam kehidupan; dalam setiap permainan selalu ada yang kalah dan yang menang; ada waktunya untuk berakhir dan memulai kembali; ada juri (atau bersama) yang menjaga aturan tetap ditegakkan; ada kesepakatan bersama yang diakui oleh semua peserta atau kontestan; dan tentunya ada pengakuan suatu capaian/prestasi yang dirayakan sebagai kemenangan. Kemenangan sebagai yang paling terampil dan berbakat dalam bidangnya. Semangat dan prinsip-prinsip dalam permainan inilah yang terwujud dalam bidang olahraga secara utuh, dan bisa dijadikan pembelajaran dalam dunia politik praktis, menjadikan peristiwa politik sebagai olahraga-politik, sehingga diharapkan bisa menghasilkan para politikus yang sehat-sehat dan sportif. Atau karena politikus kita sekarang kurang olahraga?

KESIMPULAN

1. Kebebasan berdemokrasi pasca reformasi 1998 telah memberikan ruang ekspresi setiap insan manusia Indonesia untuk bersuara, berkarya, berorganisasi, dan berpolitik yang sangat bertolak belakang dari keadaan sebelumnya, zaman rezim otoritarian Soeharto.
2. Sejak reformasi itulah muncul beragam aliran politik dan kepartaian. Organisasi massa juga tumbuh subur, dan ranah politik praktis mulai marak, perdebatan dan perebutan kekuasaan tidak lagi malu-malu (bahkan yang "memalukan" sekalipun) dan etika sopan-santun pun dilibas tanpa batas-batas

lagi. Eforia kebebasan berdemokrasi ternyata menunjukkan keaslian manusia-manusia Indonesia yang beranekaragam budaya tampil dengan kecerdasan dan kebodohan masing-masing.

3. Generasi milenial, angkatan muda yang berusia 17-30 tahun, merupakan generasi yang "kehilangan sejarah bangsanya" karena selain tidak memahami historis negara bangsanya sendiri, juga tidak/kurang peduli terhadap haluan (ideologi) negara yang dibangun di atas tanah Nusantara dari Sabang sampai Merauke.
4. Dunia pendidikan di Indonesia tidak mempersiapkan generasi penerus (angkatan muda milenial) bangsa dengan pemahaman kebangsaan dan kenegaraan yang memadai. Mereka cenderung "cuek", lebih meniru dan bangga dengan hasil budaya bangsa lain, seperti dari Eropa, Amerika, Jepang dan Korea.
5. Dunia Politik Indonesia tidak mempersiapkan anak-anak dan generasi muda untuk menghadapi tantangan global, atau persaingan antar negara-bangsa, karena itu sibuk dengan hiruk-pikuk kompetisi antar kelompok politik lokal. Dan ternyata sangat mudah sekali dipengaruhi politik aliran atau politik identitas yang sangat sempit melihat kehidupan yang beragam tanpa batas. Dalam konteks seperti inilah banyak yang mempertanyakan "Mana tokoh negarawan kita?"
6. Bangsa yang kurang perhatian dengan sportivitas dan kompetisi positif akan cenderung menjadi bangsa yang 'keras kepala', mau menangnya sendiri, dan tidak siap kalah karena itu menggunakan segala cara adalah hal biasa, karena menang akan mendapatkan posisi sosial tertinggi (meskipun dengan kecurangan) di tengah masyarakat bangsanya. Apakah negara bangsa seperti ini yang akan kita bangun?

Catatan akhir: Rekomendasi dan Aksi

1. Menjaga Indonesia sebagai NKRI tetap ada (eksis) harus dilakukan dengan kesadaran berwarga negara, dan menjadi warga negara yang memahami dan mencintai

negara bangsanya tidak bisa tidak harus, salah satunya, melalui pemahaman sejarah perjuangan bangsa, sejarah kemerdekaan, sejarah budaya daerah, melalui pemahaman asal-usulnya. Untuk ini, pendidikan sejarah memang sebaiknya menjadi pelajaran wajib di lembaga-lembaga pendidikan di negeri ini.

2. Pertemuan antar suku-bangsa yang beranekaragam budaya adalah pengkayaan dan menjadikan orang-orang muda Indonesia mengenal apa arti sesungguhnya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Oleh karena itu, menjadikan warga negara Indonesia yang mencintai kekayaannya itu akan bisa dibangun dengan interaksi orang-orang muda dari seluruh penjuru tanah air sehingga rasa memiliki Indonesia benar-benar berwarna nusantara: “Saya orang Lampung, tetapi saya bangga mempunyai Papua karena saya Indonesia.” “Saya orang Aceh, tetapi saya bangga dengan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang berjuang dalam kemerdekaan NKRI, karena saya Indonesia.” “Saya orang Jawa, tetapi saya cinta budaya Sumba yang eksotis karena saya Indonesia,” dan seterusnya. Program pertukaran pemuda antar suku bangsa dan antar pulau adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mempertemukan kekayaan budaya itu. Dan pelajaran antropologi budaya, atau pun program studi antropologi budaya perlu mendapatkan perhatian serius karena dari sanalah banyak dihasilkan orang-orang yang mumpuni dalam pengembangan kebudayaan dan mempertahankan identitas budaya dalam kehidupan harmoni nan damai. Pertemuan atau pun pengenalan antar suku bangsa dan budaya sudah sangat memungkinkan dipraktikkan dalam dunia pendidikan sejak dini, sejak dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan seterusnya.
3. Aksi-aksi kemanusiaan bisa menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk tumbuh dalam nilai-nilai kemanusiaan universal dan mengenal beragam kebudayaan dari seluruh manusia di muka bumi, sehingga pandang-

an-pandangan eksklusif tidak tumbuh subur untuk saling memperebutkan pengaruh, kekuasaan, dan kebenaran masing-masing secara sosial maupun ideologi.

4. Dukungan penuh untuk pengembangan aktivitas kesenian dan olahraga. Dunia kesenian dan olahraga mengajarkan kita semua tentang perdamaian dan persaudaraan sekalipun harus ada yang ‘kalah’ dan yang ‘menang’. Karena di sana dijunjung tinggi pencapaian manusia berprestasi, dan yang kalah belajar untuk meningkatkan lagi, sementara yang menang akan memberi semangat lagi kepada saudaranya dalam sebidang olahraga itu. Pemerintah seharusnya menyediakan semua sarana olahraga (lapangan volley, basket, stadium atletik, dst) dan kesenian (peralatan musik, panggung, ruang pentas publik, dst.) di sekolah-sekolah, maupun di kampung-kampung atau desa-desa dan kelurahan supaya anak-anak dan generasi muda tumbuh dalam meraih prestasi dengan bakat-bakat yang terlatih sejak dini. Membangun sportivitas sejak dini (Parenting.co). Ya, setidaknya anak-anak kampung juga familiar dengan biola ataupun piano, selain mengenal dengan baik alat musik tradisionalnya seperti angklung ataupun gamelan, misalnya. Hal seperti ini sangat jarang sekali ditemui di sekolah-sekolah pada umumnya, kecuali sekolah-sekolah yang dikenal mahal dan hanya ‘untuk orang kaya’.

PUSTAKA ACUAN

- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar- INSISTPress.
- <https://conveyindonesia.com/hentikan-penyebaran-radikalisme-di-kampus/>
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/29/05000091/membudidayakan-nasionalisme-dan-persatuan?page=all>
- <https://regional.kompas.com/read/2019/05/25/07214071/kisah-dokter-yusuf-nugraha-gratiskan-pasien-yang-hafal-pancasila-dan-lagu?page=all>
- <https://www.parenting.co.id/usia-sekolah/menanamkan-sportivitas-pada-anak>

- Huizinga, Johan. 2000. *Homo Ludens: Fungsi dan Hakekat Permainan dalam Budaya*. Jakarta: LP3ES.
- Lan, Thung Ju dan M.Azzam Manan-peny. 2011. *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*. Jakarta: LIPI & Yayasan Obor Indonesia
- Lombard, Denys.1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Priyono, B.Herry, A.E.Priyono, Zumrotin K.Susilo.2012. *Kratos Minus Demos*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia kerjasama dengan Bakumsu.
- Qodir, Zuly. 2016. Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.5 No.1, Mei.
- Wardhani, Prima Sulistya. 2013. *Jurnal Studi Pemuda: Membaca Nasionalisme Orang Muda*, Vol.2,No.2 September.
- Zuhdi, Susanto.2014. *Nasionalisme, Laut dan Sejarah*. Depok: Komunitas Bambu
- Wawancara:
 AM, Semarang, Februari 2016
 AR, Yogyakarta 2019
 M.An, Banda Aceh, November 2006
 MA, Solo, Oktober 2018
 MAR, Jakarta, Januari 2011
 MZ, Kalimantan Timur 2011
 Sugmn, Keerom, Jayapura, Maret 2018
 Tri, Kudus 2016
 TS, Bandar Lampung, April 1999
 WL, Jayapura, November 2018

<http://jmi.ipsk.lipi.go.id>

